

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan organisasi pekerja saat ini mengalami perubahan yang signifikan, salah satunya adalah perubahan dari dunia politik yang lebih adil. Sejak dimulainya transformasi tahun 1998, perkembangan organisasi buruh di Indonesia telah menjadi salah satu dari sedikit kekuatan politik yang sangat mengesankan. Gerakan buruh harus berkolaborasi dengan berbagai kekuatan politik lainnya guna mengadvokasi sistem politik yang adil bagi buruh. Saatnya para pegawai **“Go Politics”** telah tiba. Buruh memasuki dunia politik secara besar-besaran di Bekasi, Jawa Barat; mereka menunjuk langsung calon kepala daerah di Kabupaten Bekasi melalui jalur independen. Bekasi merupakan salah satu basis massa buruh terbesar di Indonesia. Bekasi juga menyediakan puluhan ribu pekerja untuk berpartisipasi dalam protes kesejahteraan tahunan pada 1 Mei. Terdapat 5.000 pabrik dan 700.000 pekerja di sana. Mengingat jumlah buruh yang 'meningkat', Obon Tabroni harus yakin untuk mencalonkan diri sebagai Pejabat Kota Bekasi untuk bersaing dalam pengambilan keputusan provinsi sinkron pada tahun 2017, Obon adalah pelamar pejabat independen.

Gerakan serikat buruh dapat memperjuangkan kepentingan dan hak pekerja melalui interaksi tersebut. Menurut kaum Leninis, serikat buruh adalah sebuah organisasi buruh dimana serikat buruh dapat menjangkau seluruh anggotanya dan membela serta memperjuangkan hak-hak buruh, sehingga membuat buruh merasa bahwa serikat buruh adalah rumah bagi mereka.<sup>1</sup> Hubungan mendasar antara serikat

buruh gerakan dan politik adalah bahwa setiap gerakan serikat pekerja perlu memahami betapa pentingnya politik bagi pekerja. Buruh harus menyadari kekhasan politik dan perkembangan hidup serta perkembangan para pekerja, karena apa yang terjadi akan sangat berdampak pada eksistensi buruh itu sendiri.<sup>2</sup>

Perkembangan atau perkumpulan kerja pada dasarnya menuntut kebebasan pengaturan baik dari penguasa publik maupun pelaku usaha atau pemilik modal. Namun yang terjadi adalah para spesialis hanya terfokus pada pra-perlombaan politik sebagai sumber perolehan suara dan kemudian terbengkalai. Pelecehan terhadap buruh juga semakin mendasari peraturan ketenagakerjaan (UU) yang tidak sepenuhnya melindungi kepentingan buruh di Indonesia. Berdasarkan artikel Obon Tabroni yang berjudul “**Labor Go Politics**”, setidaknya ada beberapa persoalan yang masih menjadi tuntutan buruh, antara lain persoalan jaminan hari tua, berakhirnya sistem outsourcing, dan sistem pengupahan. Pasalnya, hampir separuh anggota DPR berasal dari kalangan visioner bisnis dan individu yang dibiayai oleh pengusaha.<sup>3</sup>

Selanjutnya, serikat buruh harus berkolaborasi dan membentuk aliansi dengan kekuatan politik yang berbeda untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi buruh. Untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi buruh, organisasi pekerja tidak dapat bekerja pada tingkat yang kecil di dalam lingkup organisasi, namun serikat pekerja harus berjuang untuk hidup mereka pada tingkat skala besar, misalnya dengan memberikan dampak pada strategi publik.

---

<sup>1</sup> Iskandar Tedjakusuma, *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*, (Jakarta: TURC, 2008), hal, 124.

<sup>2</sup> Rekson Silaban, *Reposisi Gerakan Buruh: Peta Jalan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hal, 136.

<sup>3</sup> Obon Tabroni, *Politik: Strategi Baru Perjuangan Buruh*, <http://FSPMI.or.id>, diunduh pada 19 September 2023.



Kesadaran berpolitik dan partisipasi pegawai dalam kegiatan politik diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Saiful Mujani menegaskan, partisipasi politik dan kesadaran masyarakat merupakan komponen penting dalam demokrasi di Indonesia, negara demokrasi. Secara langsung atau tidak langsung, dukungan dari daerah juga siap memberikan dampak pada strategi publik yang dibuat oleh pejabat pemerintah.<sup>4</sup>

Kesadaran politik yang dimaksud adalah pengenalan terhadap kebebasan dan komitmen masyarakat sebagai penduduk Indonesia dengan memberikan perhatian dan pertimbangan terhadap latihan politik untuk mengubah iklim yang menyangkut nasib dan kehidupannya.<sup>5</sup> Menurut buku Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah tindakan ikut sertanya individu atau kelompok, selain berpartisipasi dalam kegiatan politik. Memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat, menjalin koneksi atau kontak dengan pejabat pemerintah, mengikuti gerakan sosial, atau bahkan menjadi anggota partai adalah kegiatan-kegiatan yang dipertanyakan.<sup>6</sup> Meningkatnya kemauan buruh untuk terjun ke dunia politik atau terjun ke dunia politik sudah mulai berkurang. dilihat, baik secara individu maupun dalam organisasi. Untuk menjadikan parlemen sebagai ajang perjuangan serikat buruh, sejumlah tokoh serikat melirik ranah politik. Dari situ kita bisa melihat bagaimana politik terstruktur.

---

<sup>4</sup> Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya, Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 254.

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Grasindo, 1992), hal, 184.

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal,367.

Beberapa model. Pertama, para pekerja menunjuk individu atau kerangka mereka dalam suatu kelompok ideologis untuk menjadi pendatang baru dalam bidang regulasi yang menangani para spesialis yang belum berada di bawah standar kelompok ideologis. Kedua, gerakan serikat buruh berdamai dengan partai politik untuk memudahkan buruh memperjuangkan isu kebijakan publik.<sup>7</sup> Kini semakin dekat dengan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, buruh pun mulai terjun ke dunia politik.

Dengan terpilihnya Obon Tabroni sebagai calon perseorangan (perseorangan) pada pilkada kali ini, kaum buruh langsung terjun ke kancah politik. Penjelasan Obon menggunakan jalur otonom adalah agar tidak ada kepentingan dari kelompok ideologi.<sup>8</sup> Dilihat dari kuantitas pemilih di Rezim Bekasi yang sebagian besar adalah buruh, Obon Tabroni selaku agen buruh FSPMI siap menjadi salah satu kepala daerah di Bekasi dengan menggunakan jalur otonom. Sebagai syarat untuk maju ke jalur independen, Obon Tabroni harus menggalang suara atau dukungan minimal 6,5 persen masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bekasi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muhamad Zuhdan, *Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah: Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 17, no 3, 28 Juni 2014, hal, 15

<sup>8</sup> "Obon Tabroni: Era Buruh "Go Politic" Sudah Dimulai, <http://www.suara.com>>wawancara>2016/07/18, diakses pada tanggal 19 September 2023.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang no.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang pada pasal 41 ayat 2c. diakses dari <http://www.makamahkonstitusi.go.id> pada 19 September 2023.

Berdasarkan informasi Komisi Pengambil Keputusan Politik Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, terdapat lima pasangan calon resmi, dua di antaranya menggunakan jalur otonom dan tiga di antaranya didukung oleh kelompok ideologi. Pasangan Obon Tabroni-Bambang Sumaryono (OBAMA) dan Iin Fahrihin-KH Mahmudin al-Hafiz (IMAM) adalah keduanya yang menempuh jalur mandiri. Neneng Hasanah Yasin-Eka Supriatmaja (NENENG YA) yang diusung Partai Golkar, Nasdem, PAN, dan Hanura merupakan pasangan ketiga yang didukung parpol. Pasangan kedua adalah Meilina Kartika Kadir-Abdul Kholik (MENARIK) yang mendapat dukungan dari partai PPP, PKB, PDI Perjuangan, dan PKS. Kandidat terakhir adalah Sa'dudin-Ahmad Dhani (SAH) yang didukung oleh partai PKS, Gerindra, dan Demokrat.<sup>10</sup>

Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Terdapat tujuh daerah modern, banyak organisasi, banyak serikat dagang dan ribuan atau bahkan ribuan buruh di wilayah Bekasi. Sepanjang tahun 2014 jumlah seluruh buruh di Pemerintahan Bekasi sebanyak 1.295.552 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 468.883 warga Bekasi bermata pencaharian utama di sektor industri. Terdapat 2.072.042 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bekasi pada Pilpres 2014. Dengan demikian, besar kemungkinan DPT Sementara akan memperoleh kurang lebih 2,7 juta suara pada Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2017.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> "Lima Calon Bupati Bekasi Segera Daftar ke KPU", <http://www.gobekasi.pojoksatu.id>, 20 September 2023.

<sup>11</sup> "Lima Calon Bupati Bekasi Segera Daftar ke KPU", <http://www.gobekasi.pojoksatu.id>, 20 September 2023.

Kiprah Obon Tabroni sebagai delegasi kerja daerah pada keputusan provinsi Peraturan Daerah Bekasi mendapat dukungan dari serikat-serikat buruh di Rezim Bekasi, khususnya Organisasi Persatuan Buruh Logam Indonesia (FSPMI), FSPMI Peraturan Daerah dan Kota Bekasi telah menyelesaikan sosialisasi dan bersatu bantuannya untuk Obon Tabroni-Bambang Sumaryono dalam pembuatan Peraturan Tambun Selatan, Bekasi PGRI.

Sehubungan dengan pekerjaan, kita tidak dapat memisahkannya dari persyaratan aktual dan terlebih lagi gaji terendah yang diizinkan oleh undang-undang. Pekerja hanya akan dapat bekerja secara efisien dalam produksi apabila mempunyai kondisi jasmani dan rohani yang memadai. Jika pekerja bisa mendapatkan gaji dan terpenuhi kebutuhannya, hal ini akan terjadi.<sup>12</sup> Jika Obon Tabroni dan Bambang Sumaryono terpilih menjadi Bupati, inilah harapan FSPMI dan serikat buruh pendukungnya agar Kabupaten Bekasi semakin maju. Kemenangan Obon dan Sumaryono tidak lepas dari dukungan empat serikat pekerja terhadap pasangan nomor urut 3 dalam pencalonan Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2017, antara lain menjadi tim pemenang, menjadi saksi penghitungan suara, dan memberikan hak suara kepada pasangan Obon. Hal itu terlihat pada penghitungan suara: Obon dan Sumaryono dinyatakan kalah dan menempati posisi ketiga dengan perolehan total 207.940 suara dari 3.958 TPS di Kabupaten Bekasi. Dengan perolehan suara sebanyak 309.205 suara, pasangan Sa'dudin–Dhani menduduki peringkat kedua, sedangkan pasangan Neneng–Eka Supriatmaja terpilih kembali dengan perolehan 471.483 suara dari total pemilih sebanyak 1.183.788 suara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rekson Silaban, *Reposisi Gerakan Buruh: Peta Jalan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hal, 64.

<sup>13</sup> “*Hasil Perolehan Suara*”, <https://www.pilkada2017.kpukabupatenbekasi.go.id>, 21 September 2023.





Gambar 1.1 Tabel Hasil Perolehan Suara



Para buruh dan pegawai yang mencalonkan diri sebagai bupati tidak memiliki calon wakil presiden pada Pilkada 2012. Dengan kata lain, Obon Tabronis pertama kali berperan sebagai wakil buruh saat mencalonkan diri di Kabupaten Bekasi. Dengan perolehan suara all out sekitar 17,57%, pasangan Obon bisa dikatakan mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan, terutama serikat pekerja. Sebaliknya, akhir-akhir ini mereka melemah dan terpecah belah. Partai Buruh telah memasuki dunia politik praktis, terutama sejak pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2014.

Penulis penelitian yang berjudul “Analisis Gerakan Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia terhadap Kekalahan Obon Tabroni dan Bambang Sumaryono pada Pilkada Kabupaten Bekasi Tahun 2017” ingin mengetahui apakah partisipasi buruh dalam kegiatan politik untuk memilih bupati dan wakil bupati sebenarnya didasarkan pada eksistensi kebudayaan. Politik partisipan dan kesadaran politik memungkinkan seseorang untuk memilih secara logis, cerdas dan kritis dengan tetap berpegang pada hati nuraninya.

## **1.2 Batasan Penelitian**

Dilihat dari pemeriksaan, yang dimaksud dengan buruh adalah perkumpulan yang membantu tawaran Obon Tabroni untuk melaju dengan menggunakan kursus gratis. Organisasi yang dimaksud adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan suatu soal ujian, yaitu :

1. Mengapa suara serikat buruh tidak dapat memenangkan Obon Tabroni pada Pilkada Kabupaten Bekasi Tahun 2017 ?
2. Apa sajakah variabel yang menyebabkan kekalahan Obon Tabroni dalam pilkada di Kabupaten Bekasi Tahun 2017 ?

### 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui alasan buruh tidak bisa memenangkan Obon Tabroni dalam keputusan teritorial tahun 2017.
2. Mengetahui faktor penyebab kalahnya Obon Tabroni pada Pilkada 2017.

Penelitian ini akan membantu Anda melihat dan mempelajari bagaimana partisipasi pekerja dan serikat buruh dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 di Kabupaten Bekasi. Secara praktis, manfaatnya adalah menambah informasi di bidang teori politik sehubungan dengan keputusan organisasi buruh jelang Obon Tabroni pada Pilkada tingkat provinsi tahun 2017. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengambilan keputusan pada pekerja Kabupaten Bekasi.

### 1.5 Sistematika Penulisan

## BAB I : PENDAHULUAN

Analisis Gerakan Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Terhadap Kekalahan Pasangan Obon Tabroni dan Bambang Sumaryono pada Pilkada Kabupaten Bekasi Tahun 2017 menjadi topik bab ini yang membahas dan merumuskan permasalahan, tujuan dan manfaat. penelitian, serta tujuan terkait dalam penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Teori dan konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Teori Partisipasi Politik dan Perilaku Politik serta Konsep Kelompok Kepentingan dan Kekuasaan Politik dijelaskan pada bab ini. Bagaimana ide dan teori tersebut dapat diterapkan dalam rumusan masalah skripsi yang berjudul “Analisis Gerakan Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Terhadap Kekalahan Pasangan Obon Tabroni dan Bambang Sumaryono di Pilkada Kabupaten Bekasi 2017”.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan peneliti akan dibahas pada bab ini. Pemeriksaan ini menggunakan strategi grafis subjektif dengan tipe informasi esensial dan opsional. Prosedur pengumpulan informasi penting menggunakan pertemuan, persepsi dan dokumentasi. Untuk informasi opsional, digunakan buku harian, artikel, berita, dan tulisan lain yang relevan dengan ujian. Pada bagian ini analisis juga akan memahami tujuan di balik pelaksanaan setiap teknik atau pendekatan eksplorasi.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Demikianlah analisis dari skripsi yang berjudul “Analisis Gerakan Buruh Federasi Pekerja Metal Indonesia Terhadap Kekalahan Pasangan Obon Tabroni dan

Bambang Sumaryono pada Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Bekasi.” Skripsinya tentang Federasi Pekerja Metal Indonesia. Pada bagian ini pencipta membingkai konsekuensi pemeriksaan informasi yang dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dalam eksplorasi.

## **BAB V : PENUTUP**

Rekomendasi dan kesimpulan penulis disajikan dalam bab akhir penelitian skripsi ini. Tujuan dan gagasan ini diperoleh dari penemuan-penemuan yang diperoleh dalam ujian.

